

Kalijodo dan Polemik Prostitusi

Oleh: Hendra Kurniawan

Kalijodo sudah terkenal sejak abad ke-18. Kawasan yang diapit oleh Kali Angke dan Sungai Banjir Kanal ini melahirkan banyak cerita. Sampai tahun 1950-an, Kalijodo masih menjadi tempat bagi muda-mudi untuk mencari jodoh. Memasuki tahun 1970-an, Kalijodo berubah fungsi. Kafe-kafe bermunculan bahkan rumah-rumah disulap menjadi tempat prostitusi liar.

EKSEKUSI penertiban kawasan Kalijodo yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada Senin (29/2/2016) terbilang sukses. Kawasan Kalijodo yang semula merupakan ruang terbuka hijau akan dikembalikan pada fungsinya. Terbatasnya ruang terbuka hijau di Jakarta membuat rencana alihfungsi daerah Kalijodo patut mendapat dukungan. Kelak akan jauh lebih bermanfaat bagi masyarakat luas daripada saat ini yang justru mengundang mudarat.

Kalijodo sudah terkenal sejak abad ke-18. Kawasan yang diapit oleh Kali Angke dan Sungai Banjir Kanal ini melahirkan banyak cerita. Sampai tahun 1950-an, Kalijodo masih menjadi tempat bagi muda-mudi untuk mencari jodoh. Memasuki tahun 1970-an, Kalijodo berubah fungsi. Kafe-kafe bermunculan bahkan rumah-rumah disulap menjadi tempat prostitusi liar. Praktik perjudian mulai marak hingga menghasilkan untung yang luar biasa banyak. Tempat ini beberapa kali juga menjadi sarang para pelaku kriminal.

Coen mengambil keputusan untuk memberantas tempat-tempat maksiat. Berdasarkan fakta-fakta empiris, Coen berpendapat bahwa praktik prostitusi berakibat pada kehamilan yang tidak dikehendaki, pengguguran kandungan, pembunuhan bayi, lahirnya anak-anak haram, dan konflik antara istri sah dengan perempuan pekerja seks komersial yang menjadi langganannya. Akan tetapi dalam catatan-catatan laporan selanjutnya upaya Coen ini ternyata kandas.

Selain kehamilan yang tidak diharapkan, ketiadaan alat kontrasepsi juga mempercepat penyebaran dan penularan penyakit kelamin. Pada

komersial yang disebut dengan istilah wanita publik diberi kartu kesehatan. Selain untuk keperluan pemeriksaan, kartu ini juga menjadi cara untuk memisahkan pekerja seks komersial yang terinfeksi penyakit dengan yang sehat.

Keputusan untuk melegalkan atau menyetujui komersialisasi industri seks dengan serangkaian aturan tertentu juga pernah ditempuh oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pada tahun 1970-an, Kramat Tunggak ditetapkan sebagai lokasi resmi prostitusi melalui SK Gubernur Ali Sadikin. Saat itu tercatat ada 300-an pekerja seks komersial dan 76 orang geromo. Baru pada tahun 1999, Kramat

Kementerian Sosial, tercatat sebanyak 168 lokalisasi yang tersebar di seluruh Indonesia.

Sampai sekarang, termasuk yang terakhir Kalijodo, sudah 68 lokalisasi yang ditertibkan. Artinya masih ada sekitar 100 lokalisasi yang masih beroperasi. Angka ini belum ditambah tempat-tempat prostitusi lain yang liar atau berkedok aktivitas lain.

Berhasilnya upaya penertiban Kalijodo dan sebelumnya juga Dolly di Surabaya, mendorong polemik penertiban kawasan prostitusi semakin menguat. Wacana penertiban juga menyeruak di Yogyakarta sebagaimana diangkat menjadi berita utama dalam Harian Bernas edisi Kamis (3/3). Selama ini kawasan Pasar Kembang (Sarkem) menjadi lahan subur praktik prostitusi di Yogyakarta. Hampir semua orang Yogyakarta dan sekitarnya mafhum akan ketenaran kawasan Sarkem, namun tak berarti kawasan ini tercatat (resmi) sebagai lokalisasi. Meskipun demikian Pemerintah Kota Yogyakarta tak dapat lepas tangan. Perlu dicarikan solusi untuk menertibkan kawasan yang sejak berpuluh-puluh tahun menjadi tempat

Sejarah prostitusi

Maraknya praktik prostitusi di Kalijodo tentu tidak lepas dari perkembangan kota. Kalijodo berada di wilayah Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara dan menjadi bagian dari kawasan kota tua Jakarta. Letaknya strategis, tak jauh dari pelabuhan lama Sunda Kelapa. Oleh karena itu, kawasan Kalijodo sudah dikenal sejak masa Hindia Belanda.

Meskipun pada masa Hindia Belanda, Kalijodo belum menjadi tempat hiburan malam, bukan berarti praktik prostitusi tidak ada. Dalam bukunya berjudul "Persekutuan Aneh: Pemukim Cina, Wanita Peranakan, dan Belanda di Batavia VOC", Leonard Blusse (2004) menyebut bahwa praktik prostitusi sudah ada di Batavia sejak tahun 1625. Prostitusi dengan cepat merajalela salah satunya akibat jumlah laki-laki dan perempuan yang timpang.

Fakta mengenai praktik prostitusi pertama di Batavia ini terkuak dari catatan laporan ke Dewan Kota. Tanggal 13 Agustus 1625, seorang perempuan pribumi bernama Maria datang mengadukan perbuatan suaminya, Manuel. Suaminya ini memaksa Maria dan budak perempuannya untuk melacur. Para pelanggannya adalah laki-laki Belanda. Pada tahun yang sama juga tercatat pula sebuah rumah prostitusi milik Valdero yang memelihara budak-budak perempuan. Perkembangan praktik prostitusi di Batavia kemudian terkonsentrasi di kawasan Macao Po (Jakarta Kota).

Menghadapi maraknya praktik prostitusi di wilayahnya, Gubernur Jenderal Jan Pieterszoon

masa itu masyarakat masih percaya bahwa penyakit kelamin muncul akibat kutukan Tuhan karena perilaku yang tidak bermoral. Dalam kaidah moral itu ditegaskan bahwa hubungan seksual di luar pernikahan dilarang dan praktik prostitusi dianggap sebagai penyebab utama munculnya penyakit kelamin. Di Batavia penyakit kelamin sifilis disebut penyakit mangga karena penularannya banyak terjadi di kompleks prostitusi Gang Mangga (sekitar Jalan Jayakarta sekarang).

Terence H. Hull, dkk (1997) menjelaskan teror penyakit kelamin yang semakin mengerikan mendorong pemerintah Hindia Belanda menyetujui prostitusi dengan aturan tertentu pada tahun 1852. Tujuannya pertama, mengurangi penyebaran penyakit kelamin dengan adanya pengawasan terhadap para pekerja seks komersial. Kedua, memberi jaminan keamanan pada para pelanggannya. Pekerja seks

Tunggak resmi ditutup. Akan tetapi persoalan prostitusi tak berarti selesai, justru kemudian semakin merambah ke tempat-tempat lain.

Jaringan prostitusi sulit untuk diberantas habis. Urbanisasi yang tidak terkontrol ke kota-kota besar menambah semakin banyaknya orang yang terlibat dalam praktik-praktik prostitusi. Para pekerja seks komersial juga tidak gampang melepaskan diri dari dunia kelim. Jika sudah tidak bekerja pun mereka akan ganti profesi menjadi germo. Pola seperti ini akan terus berjalan. Tak heran apabila setiap upaya penertiban kawasan prostitusi di berbagai tempat selalu menimbulkan benturan kepentingan banyak pihak.

Permasalahan Sarkem

Pemerintah sebagaimana dinyatakan oleh Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, mencanangkan Indonesia bebas dari area lokalisasi pada 2019 mendatang. Menurut data

jujukan pria hidung belang. Di sisi lain, kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi membuat modus prostitusi semakin berkembang. Tak mesti identik dengan lokalisasi, transaksi seks dapat dilakukan dengan berbagai cara. Akhirnya praktik prostitusi semakin menyebar dan sulit untuk dikendalikan. Apalagi tidak semuanya dikendalikan oleh germo atau muncikari, banyak pekerja seks komersial yang bekerja sendiri tanpa melalui perantara.

Kendati menghadapi kenyataan yang demikian ini, harapan pemerintah untuk mencapai Indonesia bebas prostitusi tentu harus didukung. Tak hanya menertibkan, namun pemerintah juga harus menyiapkan penanganan yang edukatif agar para pelaku hiburan malam tidak kembali terjun ke lembah hitam. Lapangan kerja dan kesempatan kerja harus diperluas, pengajuan modal usaha dengan syarat ringan, dan tentu saja pendampingan intensif bagi mereka yang bertekad menjalani kehidupan barunya.

Masyarakat juga harus berkontribusi, minimal dengan mau menerima kehadiran dan mendukung usaha baru yang tengah mereka jalani. Penerimaan yang positif dari masyarakat menjadi modal yang menguatkan mereka untuk bangkit dan keluar dari jeratan prostitusi. Tanpa keterampilan dan modal yang cukup ditambah dukungan dari masyarakat sekitar, maka keinginan untuk kembali pada jalan yang sesat akan terus muncul. Prostitusi memang tidak mudah untuk diberantas, namun upaya untuk menyadarkan mereka yang terlibat di dalamnya perlu diopertimalkan. ***

Hendra Kurniawan, M.Pd.
Dosen Pendidikan Sejarah
Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta

